

**PEMBERDAYAAN TANAH MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS MELALUI PENATAAN AKSES
REFORMA AGRARIA DI KALURAHAN BANGUNKERTO,
KAPANEWON TURI, KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
Pada Program Studi D-IV Pertanahan



Disusun Oleh:

DHAFIN MUFADHDHOL

NIT. 22314453

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
PROGRAM STUDI DIPLOMA IV PERTANAHAN**

2026

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Community Land Empowerment (PTM) through regulating access to agrarian reform in Bangunkerto Village, Turi District, Sleman Regency, and analyze its potential in supporting the Sustainable Development Goals (SDGs), specifically the goals of poverty alleviation, food security, decent work, and economic growth. This study uses a descriptive qualitative method. Data collection was conducted through interviews, observation, documentation, and literature review. The results show that the PTM program was implemented as a follow-up to the 2018 land redistribution program and the 2021–2023 access arrangement program by the Sleman Regency Land Office. This program is implemented through extension activities, social mapping, training, business mentoring, business legality facilitation, and digital marketing, involving relevant agencies, the community, and the private sector.

The agrarian access reform management program shows good potential in supporting SDGs (1) alleviating poverty by increasing community income, utilizing land certificates as access capital, and strengthening community economic enterprises. In SDGs (2) hunger eradication, this program sufficiently supports food security through the development of the agricultural sector and sustainable agriculture. Meanwhile, in SDGs (8) decent work and economic growth, this program is able to encourage the development of MSMEs, the fisheries sector, and tourist villages as sources of employment and local economic growth through business diversification. However, several obstacles still exist, such as limited business innovation, less than optimal product quality, dependence on chemical fertilizers, and the need for ongoing assistance for beneficiary communities.

Keyword: Community Land Empowerment, Agrarian Reform Access Arrangement, SDGs.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Akademis	7
2. Manfaat Sosial	8
3. Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Terdahulu	9
B. Kerangka Teori	18
1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	18
2. Reforma Agraria.....	20
3. Akses Reforma Agraria (ARA).....	21
4. Akses	24
5. Relevansi Pemberdayaan Masyarakat Dengan SDGs	25
6. Pengentasan Kemiskinan sebagai Prasyarat Dalam Mewujudkan Keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan.....	27

7. Ketahanan Pangan	28
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	29
C. Kerangka Pemikiran	32
D. Pertanyaan Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Format Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Definisi Operasional	37
D. Informan dan Teknik Penentuan Informan.....	39
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	40
1. Jenis Dan Sumber Data	40
2. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH KALURAHAN	
BANGUNKERTO	48
A. Sejarah Kalurahan Bangunkerto.....	48
B. Kondisi Geografis Kalurahan Bangunkerto.....	49
1. Kondisi Geografi dan Administrasi.....	49
2. Kondisi Fisik Wilayah.....	50
C. Kondisi Demografi Kalurahan Bangunkerto	52
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	53
3. Jumlah Mutasi Penduduk	54
D. Pemberdayaan Tanah Masyarakat Melalui Penataan Akses Reforma Agraria di Kalurahan Bangunkerto	55
BAB V PROBLEM SDGS DAN PEMBERDAYAAN TANAH	
MASYARAKAT DI KALURAHAN BANGUNKERTO	59
A. Kondisi Empirik/Problem Kalurahan Terkait SDGs di Kalurahan Bangunkerto.....	59
1. Kondisi Terkait Kemiskinan (pendapatan, aset dan akses) di Kalurahan Bangunkerto	59
2. Kondisi Kecukupan Pangan di Kalurahan Bangunkerto	76
3. Kondisi Peluang Kerja dan Diversifikasi Usaha di Kalurahan Bangunkerto	

.....	86
B. Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Kalurahan Bangunkerto.....	91
1. Penataan Akses Reforma Agraria di Kalurahan Bangunkerto.....	92
C. Model Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Kalurahan Bangunkerto	95
D. Analisis SWOT Program Pemberdayaan Tanah Masyarakat.....	100
1. Analisis Strategi S-O (<i>strength-opportunity</i>).....	102
2. Analisis Strategi W-O (<i>weakness-opportunity</i>)	103
3. Analisis Strategi S-T (<i>strength-threats</i>).....	104
4. Analisis Strategi W-T (<i>weakness-threats</i>)	105
E. Kendala Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kalurahan Bangunkerto Melalui Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM).....	106
1. Kendala Peningkatan Pendapatan, Aset Kepemilikan Sertipikat, Akses	106
2. Kendala Ketahanan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	108
3. Kendala Peluang Kerja dan Diversifikasi Usaha	109
BAB VI PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	121

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu prasyarat penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah terwujudnya keadilan agraria melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan struktur agraria yang berlangsung sejak masa kolonial hingga saat ini masih menjadi persoalan mendasar yang berdampak langsung pada kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Sebagai respon atas permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan reforma agraria yang tidak hanya berorientasi pada redistribusi tanah, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Arisaputra, (2016) menegaskan bahwa reforma agraria terdiri atas dua pilar utama, yaitu reforma aset (*asset reform*) dan reforma akses (*access reform*). Reforma aset memberikan kepastian hukum atas tanah melalui redistribusi atau legalisasi aset, sedangkan reforma akses diarahkan untuk membuka akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan sosial agar tanah yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. Menurut Fauzi, (2022), konsep Reforma Agraria berfokus pada perwujudan keadilan sosial melalui tiga pilar penting, yakni keadilan dalam penguasaan agraria, peningkatan hasil guna lahan, dan kemakmuran bagi rakyat.

Akses Reforma Agraria (ARA) merupakan instrumen strategis dalam kebijakan reforma agraria yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program ini mencakup berbagai kegiatan penataan akses, seperti pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, fasilitasi permodalan, penguatan kelembagaan ekonomi, serta dukungan akses pasar. Pelaksanaan Akses Reforma Agraria tersebut secara

operasional mengacu pada kebijakan pemerintah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Reforma Agraria yang menegaskan bahwa penataan akses merupakan bagian integral dari reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis pemanfaatan tanah. Melalui ARA, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh hak atas tanah secara legal, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis pemanfaatan tanah. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesiapan para penerima tanah agar mampu mengelola dan memanfaatkan lahan yang diperoleh secara optimal. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian pengetahuan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas masyarakat terkait pengelolaan serta pemanfaatan tanah (Septyanto, 2023).

Kesejahteraan publik melalui Reforma Agraria tidak akan tercapai secara maksimal jika pemerintah hanya mengandalkan otoritas formal. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada sinergi berkelanjutan dengan warga setempat, karena partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci untuk memahami dinamika dan karakteristik unik dari setiap wilayah yang menjadi sasaran program (Nauval Millenda, 2023). Luthfi Rohman (2018) menekankan bahwa dalam implementasi Reforma Agraria, penyediaan akses harus diiringi dengan penguatan kompetensi masyarakat. Pendekatan yang digunakan wajib bersifat *bottom-up* dengan mengedepankan keinginan masyarakat setempat. Hal ini krusial agar kebijakan yang diambil selaras dengan keunikan dan kekuatan sumber daya yang ada di wilayah tersebut.

Reforma agraria diarahkan untuk menunjang pencapaian pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Tujuan tersebut sejalan dengan RPJMN Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN 2025–2029, serta Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam hal ini, Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN mengintegrasikan paradigma manajemen pertanahan yang dikemukakan oleh Enemark. Mengacu pada Petunjuk Teknis Tahun 2023, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat melaksanakan Program Penanganan Akses

Reforma Agraria (PARA) yang bertujuan memberdayakan subjek reforma agraria melalui optimalisasi pemanfaatan tanah secara produktif. Program ini dirancang untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat serta menekan ketimpangan.

Menurut Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi (2020), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan konsep pembangunan yang menekankan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, keberlangsungan kehidupan sosial, pelestarian kualitas lingkungan hidup, serta terwujudnya keadilan dan tata kelola yang baik guna menjamin peningkatan kualitas hidup lintas generasi. TPB/SDGs juga menjadi komitmen bersama di tingkat global dan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat yang dirumuskan ke dalam 17 tujuan pembangunan. Dalam penelitian ini berfokus pada tujuan pengentasan kemiskinan (1), ketahanan pangan (2), serta Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (8).

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan ARA memiliki potensi besar dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Reforma agraria saat ini lebih menitikberatkan pada penataan aset dan penataan akses dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh tanah untuk diolah dan dimanfaatkan secara produktif (S. Utomo, 2021). Penelitian Kusuma, (2023) di Kalurahan Bangunkerto menunjukkan bahwa implementasi penanganan ARA berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya pada sektor UMKM olahan salak dan budidaya perikanan, kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan usaha kerja masyarakat yang berpotensi mencerminkan perubahan sosial ekonomi pascapelaksanaan ARA.

Di sisi lain, beberapa studi juga mengungkapkan bahwa keberhasilan reforma agraria sering kali lebih menonjol pada aspek penataan aset, sementara penguatan pilar akses masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses permodalan, lemahnya pendampingan usaha, rendahnya partisipasi

masyarakat, serta kurangnya sinergi antarinstansi. Kondisi ini berpotensi menyebabkan manfaat ekonomi dari reforma agraria belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat penerima manfaat. Berdasarkan Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023, pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama berupa kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria, tahap kedua mencakup Penataan Kelembagaan bagi penerima akses reforma agraria, dan tahap ketiga berfokus pada pengembangan usaha serta fasilitasi akses pemasaran. Pelaksanaan program ini wajib berlandaskan pada nilai-nilai kemandirian, semangat kewirausahaan, serta prinsip partisipatif demi mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang bersifat jangka panjang. Selain aspek finansial, diversifikasi bantuan dalam Reforma Agraria mencakup penguatan kapasitas masyarakat melalui program edukasi dan pelatihan teknis maupun manajerial. Langkah ini krusial untuk memperluas dampak kebijakan, sehingga tidak hanya sekadar memberikan akses lahan, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal dan membuka peluang kerja secara masif bagi peningkatan taraf hidup rakyat.

Kalurahan Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan program Akses Reforma Agraria oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi lokal yang kuat, terutama pada sektor pertanian hortikultura, budidaya perikanan dan UMKM olahan salak. Keberadaan program ARA di Bangunkerto diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan kelompok tani dan pelaku UMKM, serta mendorong perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, berdasarkan pengamatan awal dan temuan beberapa studi sebelumnya, implementasi ARA di tingkat lokal masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan, seperti keterbatasan akses modal lanjutan, belum optimalnya pendampingan pascaprogram, serta variasi tingkat partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pelaksanaan ARA di Kalurahan Bangunkerto mampu memberikan perubahan nyata terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat penerima manfaat

dalam jangka menengah. Menurut Surya Wira et al., (2024) dalam Perspektif Ekonomi dan Sosial Masyarakat Desa menunjukkan bahwa reforma agraria dapat mendorong mobilitas sosial ekonomi masyarakat pedesaan.

Program Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Kalurahan Bangunkerto layak untuk dikaji secara mendalam guna memahami strategi serta model kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Penelitian ini diperlukan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang berkontribusi terhadap dampak kegiatan, sekaligus melihat potensinya dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tingkat Kalurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri secara lebih mendalam perjalanan implementasi kegiatan Pemberdayaan Tanah Masyarakat di Kalurahan Bangunkerto melalui penataan akses Reforma Agraria serta perannya dalam mendorong perkembangan ekonomi, dan pertanian dalam kerangka pembangunan berkelanjutan berbasis prinsip SDGs di tingkat kalurahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai potensi dan kontribusi Pemberdayaan Tanah Masyarakat dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Penataan Akses didesain untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Di sisi lain, berbagai upaya pembangunan desa menunjukkan adanya potensi desa dalam mendukung pencapaian SDGs melalui pengembangan desa berbasis kegiatan pemberdayaan yang memberikan dampak positif (Irwan & Agustang Andi, 2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, dengan fokus pada pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan (SDGs 1), ketahanan pangan (SDGs 2), serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDGs 8). Reforma agraria yang terintegrasi dengan penataan akses diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan-tujuan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), program

pemberdayaan tanah Masyarakat di Kalurahan ini dapat dijadikan sebagai lokasi penelitian untuk memahami strategi pelaksanaan melalui potensi implementasi program, mengidentifikasi elemen-elemen yang berkontribusi, serta menelaah keberlanjutan pelaksanaannya yang dikaitkan dengan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang relevan seperti: Tanpa Kemiskinan (1) dapat dilihat dari pengurangan proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang dapat diukur dengan peningkatan pendapatan per kapita, aset terhadap kepemilikan penguasaan atas tanah, serta akses masyarakat terhadap akses transportasi, infrastruktur jalan, sarana peribadatan, layanan sosial dasar seperti Pendidikan dan kesehatan; Tanpa Kelaparan (2), indikatornya terkait dengan peningkatan produksi pangan lokal yang dapat meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat dan pertanian berkelanjutan. Penataan akses reforma agraria juga berkontribusi pada ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi pertanian yang berkelanjutan dan akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi dan terjangkau; Pekerjaan Layak dan pertumbuhan ekonomi (8), penataan akses reforma agraria dapat dilihat dari peluang kerja untuk meningkatkan pendapatan dan upah yang layak. Pertumbuhan sektor ekonomi berbasis lahan, seperti kegiatan diversifikasi usaha UMKM, juga menjadi indikator penting yang mencerminkan sejauh mana reforma agraria berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan ekonomi lokal.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan reforma agraria dapat membantu mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan memberikan akses yang lebih adil terhadap tanah dan sumber daya, meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, serta mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan di Kalurahan Bangunkerto.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Adapun tujuan

penelitian ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui riwayat implementasi Pemberdayaan Tanah Masyarakat (penataan akses) di Kalurahan Bangunkerto, termasuk strategi dan model yang digunakan
2. Menganalisis potensi kegiatan penataan akses reforma agraria dalam pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan (1) di Kalurahan Bangunkerto.
3. Menganalisis potensi kegiatan penataan akses reforma agraria terhadap ketahanan pangan (2) di Kalurahan Bangunkerto.
4. Menganalisis potensi kegiatan penataan akses reforma agraria terhadap penciptaan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi lokal (8) di Kalurahan Bangunkerto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang agraria, ekonomi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian-penelitian sejenis yang membahas pelaksanaan Akses Reforma Agraria (ARA) dan dampaknya terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya di tingkat lokal. Penelitian ini juga akan memperkaya kajian empiris mengenai keterkaitan antara kebijakan agraria dan perubahan sosial ekonomi di wilayah pedesaan, serta bagaimana implementasi reforma agraria dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang model penataan akses reforma agraria yang dapat diterapkan di kalurahan-kalurahan lainnya di Indonesia. Kontribusi ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian teori dalam literatur tentang reforma agraria dan kebijakan agraria yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan keadilan sosial.

2. Manfaat Sosial

Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak sosial dari pelaksanaan Akses Reforma Agraria terhadap kehidupan masyarakat penerima manfaat, khususnya dalam hal partisipasi masyarakat, dan perubahan pola usaha yang berbasis tanah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi dan pembelajaran bagi masyarakat di Kalurahan Bangunkerto, serta bagi daerah lain yang ingin mengimplementasikan program serupa. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk lebih aktif dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang mereka miliki, sehingga dapat menciptakan solidaritas sosial dan hubungan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Hal ini akan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, meningkatkan akses terhadap pasar, serta mendorong keberlanjutan usaha berbasis lahan di daerah tersebut.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan instansi terkait lainnya dalam mengevaluasi serta merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Akses Reforma Agraria. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan strategi yang lebih tepat dalam penataan akses reforma agraria agar lebih fokus pada pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pekerjaan layak serta pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah pedesaan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis mengenai pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, dan fasilitasi permodalan yang lebih efektif bagi masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat dan memastikan keberlanjutan program reforma agraria di tingkat lokal. Lebih lanjut, temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi berbasis tanah yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) melalui penataan akses Reforma Agraria di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) di Kalurahan Bangunkerto merupakan tindak lanjut dari kegiatan redistribusi tanah tahun 2018 yang kemudian diperkuat melalui program penataan akses pada tahun 2021–2023 dengan 200 KK sebagai subjek penerima manfaat Akses Reforma Agraria yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Penetapan lokasi program didasarkan pada kesiapan wilayah, antara lain tingginya tingkat kepemilikan sertipikat tanah (95%), hasil pemetaan sosial, serta potensi ekonomi Masyarakat. Strategi dan model yang digunakan dalam pelaksanaan Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) di Kalurahan Bangunkerto dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan pemberdayaan berbasis potensi lokal. Strategi yang digunakan meliputi penyuluhan, pemetaan sosial, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas usaha, penguatan kelembagaan, serta pemasaran digital dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dinas terkait, dan sektor swasta. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu memanfaatkan tanah secara produktif dan berkelanjutan. Sementara itu, model pemberdayaan yang digunakan adalah model *access reform* berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat pasca legalisasi aset. Model ini menekankan integrasi antara kepastian hak atas tanah dengan pengembangan usaha ekonomi produktif seperti UMKM olahan salak, pertanian hortikultura, budidaya perikanan, dan desa wisata. Pelaksanaannya dilakukan secara bottom-up melalui identifikasi kebutuhan

2. masyarakat, pengembangan usaha sesuai potensi lokal, serta pendampingan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian SDGs, khususnya pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Secara umum, program ini berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari masyarakat.
3. Berkaitan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kalurahan Bangunkerto, program Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) menunjukkan relevansi terhadap beberapa tujuan, meskipun belum sepenuhnya optimal dan merata. Berdasarkan hasil penelitian, program ini paling relevan dalam mendukung SDGs 1 (tanpa kemiskinan), serta cukup mendukung SDGs 2 (tanpa kelaparan) dan SDGs 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi).
 - a. SDGs (1) Tanpa Kemiskinan dalam penelitian ini memiliki indikator yaitu pendapatan, aset, dan akses. Kalurahan Bangunkerto menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat secara bertahap, meskipun sebagian masih berada di bawah UMK Kabupaten Sleman sebesar Rp2.624.387. Aset dalam hal ini mengalami peningkatan yang signifikan dengan tingkat kepemilikan sertifikat tanah mencapai sekitar 95%, yang memberikan kepastian hukum serta membuka peluang akses permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), meskipun belum dimanfaatkan secara merata. Akses dalam penelitian ini mencakup akses transportasi dan jalan, sarana peribadatan, layanan dasar (pendidikan dan kesehatan), serta sarana perekonomian. Secara umum, akses tersebut sudah cukup tersedia dan mendukung aktivitas masyarakat, meskipun pada beberapa aspek seperti layanan kesehatan, akses pasar, dan distribusi hasil usaha masih belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa program PTM memberikan dampak nyata dalam pengentasan kemiskinan, meskipun hasilnya belum merata di seluruh lapisan Masyarakat.
 - b. SDGs (2) Tanpa Kelaparan dalam penelitian ini berkaitan dengan ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan. Ketahanan pangan di Kalurahan Bangunkerto relatif terjaga, yang ditunjukkan dengan keberadaan lahan pertanian dan perkebunan yang masih produktif serta

pola tanam yang beragam seperti padi, salak dan palawija (kacang, jagung). Selain itu, adanya program serap gabah dari bulog dengan harga yang lebih stabil mendorong peningkatan produksi padi karena dinilai lebih menguntungkan. Namun, dalam aspek pertanian berkelanjutan masih terdapat kendala, seperti ketergantungan terhadap pupuk kimia, keterbatasan dalam pengembangan pertanian organik, serta fluktuasi komoditas unggulan seperti salak pondoh. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ketahanan pangan cukup terjaga, keberlanjutan sektor pertanian masih memerlukan penguatan.

- c. SDGs (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini diukur melalui indikator peluang kerja dan diversifikasi usaha. Di Kalurahan Bangunkerto, peluang kerja dan kegiatan ekonomi mengalami perkembangan yang cukup positif, yang ditunjukkan melalui berkembangnya UMKM berbasis potensi lokal, sektor perikanan, serta pengembangan desa wisata. Diversifikasi usaha terlihat dari inovasi produk seperti olahan salak serta didukung oleh pelatihan, pendampingan, dan akses pemasaran digital. Selain itu, penguatan kelembagaan kelompok usaha turut membuka peluang kerja bagi masyarakat. Namun demikian, kesempatan kerja yang tersedia masih terbatas dan didominasi sektor informal, serta masih terdapat kendala seperti kualitas produk yang belum optimal, keterbatasan inovasi, belum meratanya legalitas usaha, dan persaingan pasar yang semakin ketat. Hal ini menunjukkan bahwa program PTM belum sepenuhnya mampu menciptakan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara optimal.

Secara keseluruhan, Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) di Kalurahan Bangunkerto telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, capaian tersebut masih bersifat parsial atau dan belum merata, sehingga diperlukan upaya lanjutan yang lebih terarah, terpadu,

dan berkelanjutan agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih terarah dan implementatif guna mengoptimalkan pelaksanaan Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kalurahan Bangunkerto. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sertifikat tanah yang telah dimiliki oleh sebagian besar masyarakat perlu lebih dioptimalkan sebagai instrumen ekonomi produktif. Meskipun legalisasi aset telah tercapai dengan baik, pemanfaatannya masih cenderung pasif, sehingga diperlukan pendampingan yang lebih intensif dalam meningkatkan literasi keuangan serta akses terhadap permodalan yang aman dan terjangkau, agar aset tanah dapat berfungsi sebagai pengungkit peningkatan pendapatan masyarakat.
2. Pada sektor pertanian sebagai basis utama perekonomian masyarakat, diperlukan penguatan pada aspek produksi dan distribusi. Kendala seperti keterbatasan pupuk, belum meratanya sistem irigasi, serta risiko serangan hama perlu ditangani secara lebih terarah melalui dukungan teknis dan kebijakan yang berkelanjutan. Selain itu, sistem pemasaran hasil pertanian juga perlu diperbaiki agar ketergantungan terhadap tengkulak dapat dikurangi, serta didorong pengembangan pengolahan pascapanen untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.
3. Pengembangan pertanian berkelanjutan perlu diarahkan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan kesiapan masyarakat. Program pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memberikan pemahaman mengenai praktik pertanian yang ramah lingkungan, tanpa mengurangi produktivitas, sehingga keberlanjutan sektor pertanian dapat terjaga dalam jangka panjang.

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu menjadi perhatian utama dalam mendukung pengembangan peluang kerja dan diversifikasi usaha. Program pelatihan yang telah dilaksanakan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja serta potensi lokal, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengembangkan usaha yang lebih inovatif dan tidak hanya bergantung pada sektor pertanian.
5. Penguatan sektor UMKM yang telah berkembang di Kalurahan Bangunkerto perlu didukung melalui peningkatan kapasitas dalam inovasi produk, pengemasan, dan pemasaran, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, diperlukan penguatan kelembagaan usaha agar kegiatan ekonomi masyarakat tidak berjalan secara individual, melainkan dapat berkembang secara kolektif dan berkelanjutan.
6. Secara keseluruhan, pelaksanaan Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga perlu dilakukan agar setiap program yang telah berjalan dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dapat terwujud secara optimal dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, Afriansyah, Mustanir, A., Ilmi, A., Mursalat, A., Iwan Henri Kusnadi, Rusydi Fauzan, Amruddin, Duwi Siswanto, Rina Widiyawati, & Abdurohim. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat*. Www.Globaleksekutifteknologi.Co.Id
- Agusta, I. (2003a). *Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif*.
- Agusta, I. (2003b). *Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif*.
- Akbar, R., Rasyiddah, D., Anrisya, M., Fritania Julyazti, N., & Syaputri, S. (2018). *Penerapan Aplikasi Power Business Intelligence Dalam Menganalisis Prioritas Pekerjaan Di Indonesia*.
- Alfarizi, A. (2021). Literatur Review : Analisis Dampak Balai Ekonomi Sebagai Sarana Meningkatkan Jumlah Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Di Desa Borobudur. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (Jsei)*, 3(2), 48–53.
- Alir, D. (2025). Metodologi Penelitian. *Jakarta: Pt Rajawali Press/Prees*.
- Ananda Resti, F., & Wulansari, H. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria. In *Jurnal Tunas Agraria* (Vol. 5, Number 2).
- Anida, A., Daryanto, A., & Hendrawan, D. S. (2018). Strategi Penyediaan Access Reform Pada Program Reforma Agraria Di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.17358/Jabm.4.2.159>
- Ansori, M. D. (2018). *Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Faktor-Faktor Kemiskinan Di Indonesia*.
- Anugerah A. Muhammad. (2022). *Penyusunan Perencanaan Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Desa Dan Analisis Ekonominya Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*.
- Argarani, D., Yusuf, R. Z., & Malik, A. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Penentu Pembangunan Berkelanjutan Di Pedesaan. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, 2(4), 11. <https://doi.org/10.47134/jpem.V2i4.943>
- Arisaputra, M. I. (2016). *Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial: Xxi* (Number 2). <http://ekbis.rmol.co/read/2013/08/05/120963/Duh,-70->
- Asryatun Nisa Br Ginting, Cindy Alya Tantri, Ezika Aquilera Sitio, & Hanifa Ayu S. (2025). Membangun Umkm Yang Berkelanjutan: Kunci Mewujudkan Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 159–167. <https://doi.org/10.59246/Muqaddimah.V3i1.1221>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator Pekerjaan Layak Di Indonesia*.
- Blanc, D. Le. (2015). *Towards Integration At Last? The Sustainable Development Goals As A Network Of Targets*.
- Bpn (2023) Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria. Jakarta.
- Chaereni Reni, Agustanto Dedy, Wahyu Ronal Amriza, & Nainggolan Patmasari. (2020). *Ketahanan Pangan Berkelanjutan*.
- Darmawan, A. B. (2023). Implementasi Kebijakan Sdgs Pemerintah Daerah Dalam

- Mengelola Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Pandak, Kec. Baturaden, Kab. Banyumas). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(2), 145. <https://doi.org/10.22146/jkn.87986>
- Davies, A. E. (2009). Food Security Initiatives In Nigeria: Prospects And Challenges. *Journal Of Sustainable Development In Africa*, 11(1).
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Tanah Masyarakat Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2023). *Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023*.
- Fauzi, A. (2022). Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 218–233. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.678>
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (Jiph)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927>
- Furidha, B. W. (2023). Comprehension Of The Descriptive Qualitative Research Method: A Critical Assessment Of The Literature. *Journal Of Multidisciplinary Research*, 1–8. <https://doi.org/10.56943/jmr.v2i4.443>
- Hapsari, N. I., & Rudiarto, I. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kerawanan Dan Ketahanan Pangan Dan Implikasi Kebijakannya Di Kabupaten Rembang. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 5(2), 125. <https://doi.org/10.14710/jwl.5.2.125-140>
- Hendrawati Hamid, I. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*.
- Hermawati, I. (2017). *Pengukuran Konstrak Kemiskinan Di Indonesia (Istiana Hermawati) The Measurement Of Poverty Construct In Indonesia*.
- Ilmi, S. (2017). *Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam*.
- Irwan, & Agustang Andi. (2021). *Strategi Keberdayaan Masyarakat Menuju Desa Wisata Berbasis Masyarakat Yang Berkelanjutan*.
- Ishartono, & Raharjo, S. T. (2016). *Sustainable Development Goals (Sdgs) Dan Pengentasan Kemiskinan*. <http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran->
- Jariono, G., Nurhidayat, Pungki Indarto, Eko Sudarmanto, Muhad Fatoni, Qonita Binti Zuraida, Rinda Ristiyani, Rudfiando Ikhsan Putra, Nur Ikhlusal Amal, Novia Wahyu Ningsih, Nur Hasanah Al Imama, Putri Lestari, Rachma Regita Sukanto, Rehan Husnah Novizilia, & Risa Atika Nugraheni. (2023). Pendampingan Pelaksanaan Pendidikan Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Gondangrejo. *Dharma Raflesia: Jurnal Ilmiah Pengembangan Dan Penerapan Ipteks*, 21(1), 25–35. <https://doi.org/10.33369/dr.v21i1.27487>
- Jurnal Gizi Dan Pangan. (2006). *Kebijakan Umum Pangan 2006-2009*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb)/ Sustainable Development Goals (Sdgs)*.
- Khasanah, N. L., & Prabowo, B. S. (2025). *Integrasi Prinsip Sdgs Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Berbasis Kearifan Lokal*. 3(1), 37–46. <https://doi.org/10.70716/perseptif.v3i1.432>
- Kogoya, M., Posumah, J. H., & Kolondam, H. F. (2021). *Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Di Desa Jirene Kecamatan Nogy Kabupaten Lanny-Jaya*.

- Kumar Mohajan, H. (2018). Qualitative Research Methodology In Social Sciences And Related Subjects. In *Journal Of Economic Development, Environment And People* (Vol. 7, Number 1).
- Kurniasari, S. E. (2014). *Pengaruh Diversifikasi Usaha Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Dimoderasi Oleh Kepemilikan Manajerial*.
- Kusnadi, Y. (2019). Peluang Kerja Dan Peranannya Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*.
- Kusuma, L. E. V. Y. (2023). *Dampak Implementasi Penanganan Akses Reforma Agraria Di Kalurahan Bangunkerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman*.
- Lestanti, S., & Susana, A. D. (2016). *Sistem Pengarsipan Dokumen Guru Dan Pegawai Menggunakan Metode Mixture Modelling Berbasis Web*.
- Luthfi Rohman, M. (2018). *Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*.
- Mashuri, & Nurjannah Dwi. (2020). Analisis Swot Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing (Studi Pada Pt. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru). In *Jurnal Perbankan Syariah* (Vol. 1, Number 1). <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jps>
- Maulidiah, S. (2017). *Optimalisasi Pengelolaan Aset Sebagai Wujud Reformasi Birokrasi Di Daerah* (Vol. 1).
- Miles, M. B. H. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook, Edition 3*. <https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.149-160>
- Mubyarto. (1997). *Program Idt Dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusa Tenggara*.
- Muhson, A. (2006). *Teknik Analisis Kuantitatif*.
- Nasution, E. O. A. B., Nasution, L. P. L., Agustina, M., & Tambunan, K. (2023). *Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam*.
- Nauval Millenda, R. (2023). *Penanganan Akses Reforma Agraria Pasca Legalisasi Aset Di Desa Sidamukti Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap*.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghaila Indonesia.
- Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria (2024).
- Ponto, V. M. (2023). *Peningkatan Produktivitas Dalam Rangka Mewujudkan Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi (Tujuan Ke-8 Sustainable Development Goals)*.
- Pratama, W. D. (2025). *Penataan Akses Reforma Agraria Menuju Pekerjaan Layak Dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Penataan Kelembagaan Di Kelurahan Ngampilan \ Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta*.
- Prayogo, D., & Hilarius, Y. (2012). Efektivitas Program Csr/Cd Dalam Pengentasan Kemiskinan; Studi Peran Perusahaan Geotermal Di Jawa Barat. *Masyarakat Jurnal Sosiologi*, 17(1). <https://doi.org/10.7454/mjs.v17i1.1189>
- Radita, A. S., Hapsari. Damar, Pradana, D. Y., Haini, I. I., Mutiara, M. D., Apridiansyah, N. P., Wulandari, R., & Afifah, T. I. (2025). *Optimalisasi Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Melalui Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah Untuk Mendukung Ketahanan Pangan (Sdgs 02) Desa Tambakboyo*.
- Rahmi Maulida, A., Nurhayati, A., & Utami Wahyu, A. (2023). *Willingness To Continue Usaha*. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Ramadhan, A., Rahim, R., Kom, S., Kom, M., & Utami, N. N. (2023). *Teori Pendapatan (Studi Kasus: Pendapatan Petani Desa Medan Krio)*.

- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural Sociology*, 68(2), 153–181. <https://doi.org/10.1111/j.1549-0831.2003.tb00133.x>
- Rustamana, A., Adillah, M., Kiyah Maharani, N., Fayyadh, F. A., Keguruan, F., Pendidikan, I., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2024). Qualitative Research Methods. *Indonesian Journal Of Interdisciplinary Research In Science And Technology (Marpopolo)*, 2(6), 919–930. <https://doi.org/10.55927/Marpopolo.V2i6.9907>
- Saheriyanto, & Suhaimi, A. (2021a). *Pendampingan Dan Akses Modal Sebagai Strategi Access Reform Dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan Di Kabupaten Barito Kuala*.
- Saheriyanto, & Suhaimi, A. (2021b). *Pendampingan Dan Akses Modal Sebagai Strategi Access Reform Dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan Di Kabupaten Barito Kuala*.
- Saputro, A. A. K. W. (2024). *Potensi Penataan Akses Reforma Agraria Pada Ketahanan Pangan (Studi Perbandingan Agribisnis Peternakan Sapi Perah Dan Usaha Tani Alpukat Di Desa Pagerjurang*.
- Saud, I. W., Mohi, W. K., & Pakaya, N. A. (2020). Analisis Peran ‘Aisyiyah Wilayah Gorontalo Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (Sdgs). *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.31314/Pjia.9.1.1-14.2020>
- Sebestyén, V., Bulla, M., Rédey, Á., & Abonyi, J. (2019). *Network Model-Based Analysis Of The Goals, Targets And Indicators Of Sustainable Development For Strategic Environmental Assessment*.
- Septiadi Dudi, & Mundiayah Adi Iva. (2020). *Strategi Pengembangan Usaha Tani Sayuran Berbasis Pertanian Organik*.
- Septyanto, I. M. G. (N.D.). *Dampak Program Akses Reforma Agraria Melalui Pengembangan Budidaya Lebah Madu Bagi Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberklampok*.
- Setianingias, R., Baiquni, M., & Kurniawan, A. (2019). *Pemodelan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Modeling Indicators Of Sustainable Development Goals In Indonesia*.
- Siami, A. N., & Asmorowat, S. (2022). *Pemetaan Sosial Ekonomi Pelaku Usaha Hasil Laut Desa Bajo Dalam Program Pemberdayaan Tanah Masyarakat (Ptm)*.
- Sinaga, N. A., & Nugraha, R. (2022). *Perspektif Hukum Adat Dalam Konstitusi Hukum Positif Di Indonesia*.
- Siringoringo, L. G. R. (2022). *Program Dalam Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs) Dalam Hal Masalah Perubahan Iklim Di Indonesia*.
- Sopyan Amalia Arofah Puji. (2024). *Pemberdayaan Tanah Masyarakat Dalam Mendukung Sustainable Development Goals: Studi Implementasi Penataan Akses Reforma Agraria Di Desa Wisata Purwabakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor*.
- Stockholm Declaration On The Human Environment. (1972). *Declaration Of The United Nations Conference On The Human Environment*.
- Sudalmi, E. S. (2010). *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan*.
- Sudirman, F. A., & Susilawaty, F. T. (2022). Kesetaraan Gender Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs): Suatu Reviuw Literatur Sistematis. *Journal Publicuho*, 5(4), 995–1010.

- <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i4.41>
- Sugiono. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Sugiyono. *Mode Penelitian Kualitatif*, 5(January).
- Sulistyaningsih, R. (2021). *Reforma Agraria Di Indonesia*.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). *Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder Dan Tersier*.
- Surya Wira, Arya Salman, Abimanyu Aziz, Rofi Wahanisa, & Muhammad Adymas. (2024). Reforma Agraria Dan Transformasi Mobilitas Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Dan Sosial Masyarakat Desa. *Journal Customary Law*, 2(1). <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3376>
- Susanto, E. (2019). *Penerapan Pendekatan Saintifik Dan Penilaian Autentik Dalam Pembelajaran Al-Islam Pada Kelas Iv Di Sd Muhammadiyah 1 Palembang*.
- Syahidan, M. I., Herbowo, A. B., & Wulandari, S. (2015). *Peningkatan Kualitas Layanan Berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelanggan Pospay Kota Bandung Menggunakan Servqual, Model Kano, Dan Teknik Triangulasi*.
- Theresia, A. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Turistiati, A. T. (2016). Pentingnya Komunikasi Efektif Dalam Mensosialisasikan Dan Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Prosiding Seminar Stiarni, Iii(01)*. <http://www.unpad.ac.id/2015/09/Isu->
- Ula, A. (2021). Visi Sustainable Development Goals (Sdgs) Terhadap Kebijakan Diversifikasi Pangan Lokal Dalam Mengatasi Kelaparan. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (Jsei)*, 3(2), 58–64.
- Utomo, D. L., Mulyanto, B., & Panuju, D. R. (2025). Kondisi Struktur Agraria Dan Modal Penghidupan: Studi Kasus Pasca Reforma Agraria Di Desa Sumberklampok. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 14(1), 181–194. <https://doi.org/10.23887/jish.v14i1.90050>
- Utomo, S. (2021). *Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan*. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/>
- Wadu Ludovikus Bomans, Gultom Andri Fransiskus, & Pantus Fronialdus. (2020). *Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi: Bentuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan*.
- Wahab Syakhirul Alim, Sardjana Orba Manullang, Firman Aziz, Sukron Romadhon, Anna Marganingsih, Mansur, Endah Marendah Ratnaningtyas, Kuswarini Sulandjari, Yusuf Efend, Renny Wulandari, & Hanifah. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Dan Strategi*. <https://www.researchgate.net/publication/361611930>
- Whang, F., & Zhang, Y. (2020). The Role Of Social Services In Social Welfare And Poverty Alleviation: A Case Study Of Rural China. *Journal Of Social Policy*, 49(3), B1–B4. <https://doi.org/10.1017/S0047279420000331>
- Winoto, J. (2009). Strategi Kebijakan Pertanahan Nasional Dalam Perspektif Politik Ekonomi Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan. In Makalah Utama Dalam Prosiding Semiloka Nasional Tanggal 22-23 Desember 2008. Bogor: Departemen Ilmu Tanah Dan Sumberdaya Alam, Fakultas Pertanian Ipb.
- Withers, R. S., Banks, G., Mcgregor, A., & Meo-Sewabu, L. (2014). *Qualitative Research*. <http://ebookcentral.proquest.com/lib/massey/detail.action?docid=4714119>.